

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perempuan, baik yang bersifat formal maupun informal, menyediakan ruang bagi Perempuan untuk mengembangkan keterampilan politik, membangun jaringan, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik mereka. maka dari itu untuk mendorong peningkatan kaum Perempuan dalam partisipasi politiknya banyak upaya yang telah dilakukan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh (Yuliani, 2020) bahwa Organisasi Perempuan berupaya untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik dan memberikan kesadaran bagi Perempuan untuk merobak sisi kesadaran kaum Perempuan tentang pola hubungan struktural antara kaum laki-laki dan Perempuan harus dirubah serta memberikan Pendidikan Politik bagi kaum Perempuan.

Menurut Marion Y (dalam Silvester, 2024) menyatakan bahwa Organisasi Perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan ruang bagi Perempuan untuk belajar mengenai politik dan memperjuangkan kesetaraan gender. Melalui konsolidasi identitas dan pengalaman bersama, Organisasi Perempuan memberikan ruang bagi Perempuan untuk memahami penindasan yang mereka hadapi dan mencari solusi secara kolektif. Young berpendapat bahwa dengan berorganisasi, Perempuan dapat mentransendensikan batasan-batasan yang diciptakan oleh norma sosial dan

budaya yang menghambat kemampuan mereka untuk terlibat dalam politik. Ini tidak hanya mendorong kesadaran akan isu-isu gender, tetapi juga membangun solidaritas yang mampu merangsang tindakan kolektif yang diperlukan untuk mengubah kebijakan publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Secara empiris, pemberdayaan Perempuan masih menjadi masalah besar di banyak negara. Karena menurut (Hanna Pitkin, 1969) partisipasi politik Perempuan tidak hanya melalui Organisasi Perempuan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam proses politik yang lebih luas lagi. Bahkan pitkin membedakan antara *representasi deskriptif* dan *representasi substantif*. *Representasi deskriptif* berkaitan dengan jumlah Perempuan dalam lembaga politik, sementara *representasi substantif* menekankan Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan dan kebijakan yang relevan bagi perempuan, seperti kesetaraan gender dan hak asasi.

Persepsi semakin berkembang ini menurut (Sylvia Walby, 1990) mengatakan bahwa Perempuan bisa terlibat dalam politik melalui berbagai cara, termasuk di dalam partai politik, lembaga legislatif, atau dalam masyarakat sipil secara lebih umum, meskipun mereka tidak harus tergabung dalam Organisasi Perempuan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik Perempuan bersifat multidimensional dan terikat pada berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Sakina (dalam Hurustyanti et al, 2021) salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan gender adalah patriarki, yang menempatkan Perempuan di posisi yang lebih

rendah daripada laki-laki. Sejak zaman dulu Laki-laki selalu berada di atas atau mendominasi sedangkan Perempuan berada di bawah. Organisasi Perempuan dapat membantu Perempuan lebih terlibat dalam politik, tetapi masih ada beberapa tantangan struktural, seperti diskriminasi gender dalam partai politik, ketidaksetaraan dalam akses ke Pendidikan Politik, dan Dukungan Sosial yang menghalangi Perempuan untuk bergerak dalam politik (Georgina, 2014)

Menurut (Gaffar, 2001) bahwa norma sosial menghalangi Perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Banyak alasan mengapa hanya sedikit Perempuan yang terjun ke dunia politik. Salah satu yang paling penting adalah keyakinan bahwa Perempuan disubordinasikan ke dunia politik karena norma sosial yang ada menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Fenomena empiris seperti yang terdapat di negara Liberia bahwasannya keterbatasan Pendidikan bagi kaum Perempuan yang mengakibatkan sosial budaya yang kurang responsif terhadap gender. Bahkan tidak di terapkannya system kuota partisipasi Perempuan dalam undang-undang negara Liberia (Ramadhanty, 2024).

Salah satu organisasi non pemerintahan yaitu Fatayat Nahdatul Ulama (NU) di mana organisasi badan otonom di bawah organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 24 April 1950 di Surabaya. Pendiri fatayat dikenal sebagai “Tiga Serangkai” yaitu Murtosiyah dari Surabaya, Chuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo. Dengan bertujuan untuk memperjuangkan kaum Perempuan terutama dalam

organisasi NU. Fakta dari organisasi ini para Perempuan yang memiliki usia dewasa sudah terwadahi oleh Muslimat NU dan untuk para pemuda juga sudah di tempatkan oleh GP Anshor, maka dari itu masing-masing punya wadahnya tersendiri dan menyesuaikan dengan keinginan dalam berbagai program. Selain itu, Fatayat NU juga terlibat dalam advokasi isu-isu Perempuan dan anak serta berperan dalam pengembangan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan beberapa program yang di jalankan oleh Fatayat NU seperti program pendidikan politik yang dimana memberikan suatu pemahaman bagi anggota dan masyarakat tentang hak dan kewajiban bernegara, sistem politik serta proses demokrasi, dan terdapat strategi dalam menyampaikannya yaitu ada struktural yang dimana program Pendidikan Politik dijalankan secara formal melalui kegiatan resmi organisasi, seperti seminar, workshop, lokakarya, pelatihan kader, dan forum dialog dan kultural seperti dilakukan melalui pendekatan personal, motivasi, dorongan semangat, serta turun ke bawah (turba) untuk menjangkau Perempuan di luar struktur organisasi (Agustin et al, 2016). Selain dari pendidikan politik ada juga dari dukungan sosial dimana terdapat program seperti mengadakan kegiatan sosial atau bakti sosial yang dapat meningkatkan solidaritas anggota dan masyarakat. Dimana organisasi yang berada di bawah naungan Nahdatul Ulama ini menjadikan perannya yang strategis dalam memperkuat moderasi beragama yang melalui pemberdayaan Perempuan sebagai agen

perubahan sosial yang aktif dalam menyebarkan toleransi, inklusivitas, dan perdamaian di kalangan masyarakat

Pendidikan Politik merupakan suatu proses untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sampai mereka memahami dan mendalami nilai-nilai dalam sistem politik yang ideal. Hal tersebut mencakupi pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Batubara, 2021). Pendidikan politik memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui berbagai metode dan tujuan yang jelas, Pendidikan Politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Hal ini ditunjukkan dengan suatu penelitian dari (Abdul et,al 2019) bahwa Pendidikan politik ini berkontribusi sebesar 33,9% terhadap partisipasi politik masyarakat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sama halnya seperti penelitian dari (Arwiyah, 2012) Pendidikan Politik besar berkontribusi terhadap kesadaran partisipasi politik sekitar 28,62%, bahwa setiap warga negara harus memiliki pengetahuan untuk menjadi warga negara yang cerdas dan dapat mempengaruhi kebijakan umum. Namun ada juga Pendidikan Politik terhadap partisipasi politik yang hasil persentasenya lebih rendah yaitu pada penelitian yang dilakukan di Kelurahan Gunung Tabur oleh (M. Ari Julianto, 2015) yang menunjukan bahwa Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,154 mengindikasikan bahwa hanya 15,4% partisipasi politik dapat dijelaskan oleh variabel

Pendidikan Politik. Ini berarti bahwa 84,6% variasi dalam partisipasi politik disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari banyaknya hasil penelitian bahwa Pendidikan Politik tersebut banyak berpengaruh positif dan sejauh peneliti mencari hasil yang tidak berpengaruh itu sama sekali tidak di dapatkan.

Dukungan Sosial merupakan suatu hal yang penting dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi seorang individu. Dan Dukungan Sosial merujuk pada kehadiran dan bantuan dari orang lain yang memberikan rasa nyaman, aman dan perhatian kepada individu (Yanni N, 2015). Menurut (Jalal et. al 2021) mengatakan bahwa peran Dukungan Sosial sangat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri individu dan individu yang menerima Dukungan Sosial sangat bergantung pada siapa yang memberikannya. Dan media sosial telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam memobilisasi Dukungan Sosial untuk kegiatan politik. Misalnya, gerakan sosial seperti *#MeToo* dan *Black Lives Matter* menunjukkan bagaimana Dukungan Sosial melalui media sosial dapat menggalang partisipasi politik secara luas dan cepat (Chairunisa et al. 2024). Maka dari itu Dukungan Sosial ini bergerauh positif terhadap partisipasi politik. Namun ada penelitian menurut (Yuhdi F, 2015) bahwa political voluntarism (kesukarelaan politik) hanya memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap Partisipasi Politik masyarakat. Sebagian besar Partisipasi Politik justru dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat literasi politik, Pendidikan Politik, dan informasi politik. sehingga Dukungan Sosial melalui

kesukarelaan tidak berdampak signifikan pada peningkatan Partisipasi Politik.

Organisasi masyarakat Perempuan yang menjadi wadah bagi Perempuan untuk belajar berorganisasi dan mengembangkan potensi politiknya. Dalam (Velasi, 2013) menunjukan bahwa partisipasi pemilih Perempuan dalam representasi politik anggota legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang masih tergolong rendah, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 53,47%. Hasil tersebut merupakan sebagian hasil dukungan dari organisasi masyarakat Perempuan, dengan melalui organisasi-organisasi Perempuan dapat memberikan dukungan dan jaringan yang diperlukan untuk mendorong Perempuan terlibat dalam politik.

Dari beberapa ulasan pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan atau ketidaksamaan yang menunjukan bahwa partisipasi politik Perempuan itu tidak hanya melalui organisasi saja dan bahkan terdapat hambatan-hambatan bagi kaum Perempuan untuk ikut serta dalam Partisipasi Politik. Maka dari itu penelitian ini menunjukan kemasyarakatan bahwa dengan adanya organisasi Perempuan ini bisa menarik perhatian bagi mereka untuk terlibat dalam mendorong proses politik. Dalam penelitian ini menguatkan Partisipasi Politik Perempuan yang dipengaruhi oleh organisasi Fatayat NU yang di mana organisasi tersebut berupaya untuk melakukan pemberdayaan bagi kaum Perempuan dan membantu menyelesaikan permasalahan public khususnya keadilan dan kesetaraan gender. Sebagai organisasi Perempuan dibawah naungan Nahdatul Ulama

menyelenggarakan beberapa program-programnya secara independent dan tidak terikat pada bantuan pemerintah. Ketika menjalankan aktivitasnya organisasi ini selalu mengedepankan nilai-nilai perjuangan dan kepentingan kaum Perempuan. Menurut Agustin & Sari dalam (Godjali, 2020) berpendapat lebih khusus lagi sebagai organisasi Perempuan Islam Fatayat NU membantu meningkatkan literasi politik tentang kesadaran kewarganegaraan dan hak politik serta mendorong partisipasi politik Perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seperti apa pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis?
2. Seperti apa pengaruh Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan Politik dan Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis?
4. Bagaimana moderasi Fatayat Nahdlatul Ulama terhadap pengaruh Pendidikan Politik dan Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis
2. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan Politik dan Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis
4. Untuk mengetahui bagaimana moderasi Fatayat Nahdatul Ulama terhadap pengaruh Pendidikan Politik dan Dukungan Sosial terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kecamatan Ciamis

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat di kecamatan ciamis untuk tidak apatis terhadap politik. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia terutama di Kecamatan Ciamis yang tidak hanya terbatas pada peningkatan partisipasi itu sendiri, tetapi juga

mencakup pengembangan pemahaman, kebijakan, dan kesadaran sosial yang lebih luas mengenai isu gender dalam politik. Penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi langkah-langkah lebih lanjut dalam pemberdayaan perempuan di berbagai tingkat masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktik

Secara praktis bagi penulis diharapkan perempuan dapat mendiskusikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak Perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui organisasi Fatayat NU. Dan Partisipasi dalam pembahasan isu-isu tersebut memberi Perempuan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebijakan yang berpihak pada Perempuan dan anak. Selain itu, ini juga memperkuat argumen-argumen perempuan dalam berpartisipasi dalam politik dan proses pembuatan kebijakan.